



# RENCANA KERJA (RENJA)

## TAHUN 2022



### INSPEKTORAT

### KABUPATEN LUWU TIMUR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**INSPEKTORAT**

Jalan. DR. Sam Ratulangi No.1 Puncak Indah Malili, 92981

Telp. (0474) 321-455, 414-280 Fax (0474) 321-455

Email : [inspektoratlutim@gmail.com](mailto:inspektoratlutim@gmail.com) Website : <http://luwutimurkab.go.id>

---

---

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 700/ /KEP/ITKAB/2021

TENTANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf “ a ” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Inpektur Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

- KE SATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas :
    1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Inspektorat Tahun 2021;
    2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja inspektorat Tahun 2022; dan
    3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  - b. Ketua bertugas :
    1. mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Inspektorat Tahun 2022;
    2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja Inspektorat Tahun 2022;
    3. mengkoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
    4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  - c. Sekretaris bertugas :
    1. menyusun dokumen Renja Inspektorat Tahun 2022;
    2. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
    3. merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2022; dan

4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

d. Anggota bertugas :

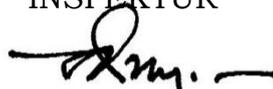
1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan kinerja program/kegiatan;
2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
3. melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
5. merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2022;
6. menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
7. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 22 Februari 2021

INSPEKTUR



**SALAM LATIEF, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19690403 198903 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 700/ /KEP/ITKAB/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

- Penanggung jawab : Inspektur  
Ketua : Sekretaris Inspektorat  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV  
5. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan  
6. Kasubag Administrasi dan Umum

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 22 Februari 2021

INSPEKTUR



**SALAM LATIEF, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19690403 198903 1 007



# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmad-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga setiap OPD diharuskan mempunyai dasar pedoman berupa dokumen rencana kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, namun demikian dokumen Renja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah disusun ini merupakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang disusun telah selaras dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Harapan kami dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini, dalam proses menuju ke pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan penyusunan RKA, sehingga target sasaran dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dapat tercapai.

Malili, Juni 2021

Inspektur,

**SALAM LATIEF, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Landasan Hukum .....	2
1. 3 Maksud dan Tujuan .....	5
1. 4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN LALU</b> .....	<b>7</b>
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	7
2. 2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	22
2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	24
2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR</b> .....	<b>35</b>
3. 1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	36
3. 3 Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ...	<b>44</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>49</b>





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Tahun 2021 .....	8
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	22
Tabel 3	(T-C.30) Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur .....	23
Tabel 4	(T-C.31) Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.....	26
Tabel 5	Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan .....	34
Tabel 6	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Daerah .....	35
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kab. Luwu Timur .....	36
Tabel 8	(T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 & Perkiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Kab. Luwu Timur .....	38
Tabel 9	Rencana Kerja & Pendanaan Inspektorat Kab. Luwu Timur .....	45





# **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Rencana kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber pendanaannya.

#### **1. 2 Dasar Hukum**





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010;
8. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah NO. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578);





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010-2025;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

34. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Luwu Timur.

### 1. 3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten LUwu Timur Tahun 2022 bertujuan agar terjalin sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Rencana kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
2. Penyusunan kebijakan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022.

### 1. 4 Sistematika Penulisan

RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Dasar Hukum
1. 3 Maksud dan Tujuan
1. 4 Sistematika penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU**

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

- 3. 1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
- 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V. PENUTUP**





**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep tersebut menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya yang digunakan, seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya dalam melakukan suatu kegiatan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 (T-C.29)**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
	PENGAWASAN									
	INSPEKTORAT									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Berdasarkan PKPT								





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	Jumlah OPD yang diawasi kinerja dan keuangannya	39	39	39	39	100,00	39	39	20,00
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan kinerja	39	39	39	39	100,00	39	39	20,00
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas)	56	56	56	56	100,00	56	56	20,00
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3	3	2	2	100,00	3	2	13, 33
	Reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	6	1	6	6	100,00	6	2	6,66
	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan desa yang dilaksanakan	44	124	44	44	100,00	44	0	0,00





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kerjasama pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	1%	0	3,09%	6,63%	45,45%	3,00%	1,64%	54,66%
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	92	53,36	50,00	81,27	162,54	88,00	75,98	86,34
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	92	96,77	50,00	92,71	185,42	95,00	92,71	97,58
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Presentase obrik yang dibina tersangkut kasus korupsi	1%	0	3,09%	6,63%	45,45%	3,00%	1,64%	54,66%





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	10	0	0	0	0	0	0	0
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu	25	24	26	26	100	25	5	4,00%
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95	95	95	100	100	100	28,20	28,20
	KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	presentase obrik binaan yang didampingi	100	100	100	100	100	100	100	100





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	42	13	20	15	75,00	42	2	4,76
	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan	39	0	3	3	100	39	39	20
	Koordinasi, konitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	9	9	9	9	100	9	9	20
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase penunjang urusan perangkat daerah	100	83,33	95,00	96,68	100	100	59,56	59,56





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		berjalan sesuai standar								
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	2	2	100	3	0	0
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	0	0
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	100	2	2	100





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10	10	10	10	100	10	2	20
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45	50	50	50	100	45	45	20
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	18	18	18	100	18	4	4,44
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Presentase pegawai yang dilayani	100	100	100	100	100	100	0	0





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	45	0	0	0	0	45	0	0
	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutahirkan	12	0	0	0	0	12	0	0
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	53	16	2	2	100	53	0	0
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200	200	0	0	0	200	0	0
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	10	12	2	2	100	10	0	0





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Implementasi Peraturan perundang-undangan								
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Presentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	83,33	95,00	96,68	100	100	83,46	83,46
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13	25	55	38	69,09	13	0	0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	4	0	0	0	2	0	0
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	16	16	16	16	100	16	16	16





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1.300	93.094	84.818	35.811	55,25	13.000	888	13,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	60	60	60	100	60	15	5
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	375	1.652	1.936	1.608	83,06	375	45	2,4
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	73	59	20	25	100	73	10	2,74





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	100	0	0	0	100	0	0
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	10	206	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	1	0	0	0	1	0	0





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Presentase kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	83,33	95,00	96,68	100	100	55,39	83,46
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1.300	1.622	1.200	1.045	87,08	1.300	215	3,31
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	24	26	24	24	100	24	6	5
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	5	3	5	5	100	5	5	100





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	91,06	90	91	100	100	43,49	43,49
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	8	8	8	100	8	1	12,5
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44	31	42	53	100	44	9	4,09
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	0	0





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, beberapa hal yang menjadi catatan antara lain :

- A. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target :
  1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, pada Sub Kegiatan :
    - a. Kerjasama pengawasan internal  
Dari 183 obrik binaan (39 OPD, 3 Kelurahan, 124 Desa dan 17 Puskesmas), di Tahun 2020 terdapat 11 obrik dan di Tahun 2021 sampai akhir bulan Maret terdapat 3 obrik yang dilakukan pemeriksaan khusus atas permintaan APH.
  2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, pada Sub Kegiatan :
    - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah  
Pada Tahun 2020, dari Target 25 proyek fisik yang didampingi pelaksanaannya hanya terealisasi 15 proyek, dan di Tahun 2021 sampai akhir Bulan Maret 2021, dari target pendampingan 15 proyek fisik terealisasi 2 kali pendampingan.
- B. Program/Kegiatan yang memenuhi/melebihi target :
  1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
    - A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, pada Sub kegiatan :
      - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
      - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
      - c. Reviu Laporan Kinerja
      - d. Reviu Laporan Keuangan
      - e. Pengawasan desa
      - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
    - B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu, pada Sub kegiatan :
      - a. Pengawasan dengan tujuan tertentu
  2. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, pada Sub Kegiatan :
- Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
  - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

### 2. 2 ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 yang sementara dalam proses penyusunan maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikator sebagai berikut :

**Tabel 2**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Mewujudkan kualitas pengawasan daerah		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Level	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Capaian Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3376	3,3380	3,3380	3,3381	3,3382

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Restra Inspektorat tertuang dalam capaian sasaran strategis sebagai berikut :





**Tabel 3 (T-C.30)**

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	Standar Nasional	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Mekanisme penilaian maturitas SPIP mengalami Perubahan

Fokus penilaian Maturitas SPIP merupakan sub unsur SPIP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 25, unsur tersebut yaitu :

1. Unsur lingkungan pengendalian, terdiri atas 8 sub unsur;
2. Unsur penilaian resiko, terdiri atas 2 sub unsur;
3. Unsur pengendalian, terdiri atas 11 sub unsur;
4. Unsur informasi dan komunikasi, terdiri atas 2 sub unsur; dan
5. Unsur pemantauan, terdiri atas 2 sub unsur.

Ada lima strategi untuk peningkatan maturitas SPIP, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis;
2. Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur;
3. Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi;
4. Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi;
5. Pemantauan/pengembangan berkelanjutan.

Pada Tahun 2021 sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana penilaian Maturitas SPIP dimulai dari manajemen resiko sejak perencanaan dilaksanakan.





## **RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra OPD harus disusun mengenai manajemen resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun.

### **2.3 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah yang ada di daerah yaitu Inspektorat daerah bertujuan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

Selama ini keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas (APIP) dinilai dari semakin banyak temuan maka pengawasan dianggap semakin baik sehingga perannya seperti anjing pelacak (watchdog) atau entitas pemeriksaannya dan selaku watchdog aktivitasnya meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigam peran APIP dari watchdog menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan resiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD/SKPD serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* salah satu perannya adalah melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas dokumen RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya sebagai watchdog menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, sebagai Pengawas intern Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di Tahun 2022 pasti akan penuh tantangan, antara lain :

1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Reviu terhadap refocusing dana penanganan covid-19)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public (pengalokasian obat-obatan penanganan covid-19)
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
4. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi khususnya dengan APH dan auditan
5. Peningkatan SDA Pengawasan

Strategi pemecahan masalah dan isu-isu penting antara lain melalui :

1. Pelaksanaan pemeriksaan internal dan reviu;
2. Melaksanakan peningkatan koordinasi dengan APH;
3. Penerapan teknologi pengawasan dana desa
4. Meningkatkan koordinasi dengan auditan melalui klinik konsultasi pengawasan.





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

## 2. 4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 4 (T-C.31)**

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cacatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					
<b>I.1</b>	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>					<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>					
I.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah obrik pengawasan Kinerja	39 OPD	200.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah obrik pengawasan Kinerja	39 OPD	300.000.000	
I.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab/Ke c	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas)	56 Obrik	837.392.790	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab/Ke c	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas)	56 Obrik	1.100.000.000	
I.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Malili	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	31.716.500	Reviu Laporan Kinerja	Malili	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	3 Kali	31.716.500	Lakip digabungkan dengan LPPD





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

I.1.4	Reviu Laporan keuangan	Malili	Jumlah reviu Laporan keuangan yang dilaksanakan	6	67.926.575	Reviu Laporan keuangan	Malili	Jumlah reviu Laporan keuangan yang dilaksanakan	6 Kali	67.926.575
I.1.5	Pengawasan Desa	Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	44 desa	219.231.500	Pengawasan Desa	Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	124 desa	750.000.000
I.1.6	Kerjasama pengawasan internal	Malili	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	1 Persen	434.040.000	Kerjasama pengawasan internal	Malili	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	1 Persen	477.453.099
I.1.7	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Malili	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88,00	200.000.000	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Malili	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	88,00	200.000.000
			Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95,00				Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	95,00	
I.2	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>					<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>				
I.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Malili	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	10 Kali	100.000.000					





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

I.2.2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	25 Kali	100.000.000	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu	50 Kali	400.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>					<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				
<b>II.1</b>	<b>KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>					<b>KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				
II.1.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Malili	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	42 kali	489.036.992	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Malili	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	81 kali	150.000.000
II.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Malili	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	39 OPD	11.650.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Malili	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	39 OPD	11.650.000
II.1.3	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	9 Obrik	178.730.000	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	9 Obrik	28.730.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

III.1 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
III.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	29.554.070	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	29.554.070	
III.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	11.801.086	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	11.801.086	
III.1.3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.373.620	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.373.620	
III.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	46.382.471	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	46.382.471	
III.2 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
III.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 Orang	4.463.797.840	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 Orang	6.063.797.850	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

III.2. 2	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	3.579.768	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	5.797.685
<b>III.3</b>	<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>					<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>				
III.3. 1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Malili	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	53 Pasang	47.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Malili	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	53 Pasang	47.500.000
III.3. 2	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Malili	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutahirkan	12 Dokumen	6.821.694	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Malili	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutahirkan	12 Dokumen	6.821.694
III.3. 3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Mks, bandung, Batam	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	53 Orang	484.391.485	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Mks, bandung, Batam	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	53 Orang	484.391.485
III.3. 4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	32.819.070	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	32.819.070
III.3. 5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	10 Orang	100.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	10 Orang	100.000.000





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

III.4 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
III.4.1	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Malili	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Buah	1.348.900	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Malili	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 unit	1.348.900	
III.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Malili	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	21.806.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Malili	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	21.806.500	
III.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Malili	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	16 Jenis	3.908.700	Penyediaan bahan logistik kantor	Malili	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	16 Jenis	3.908.700	
III.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Malili	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13.000 Lembar	10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Malili	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13.000 Lembar	10.000.000	
III.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Exemplar	6.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Malili	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Exemplar	6.180.000	
III.4.6	Fasilitasi kunjungan tamu	Malili	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	375 Orang	14.875.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Malili	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	375 Orang	14.875.000	
III.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar daerah Dalam dan Luar Prov	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	73 Kali	521.229.200	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar daerah Dalam dan Luar Prov	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	73 Kali	521.229.200	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

<b>III.5 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
III.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Malili	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	450.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Malili	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	500.000.000	
III.5.2	Pengadaan Meubeler	Malili	Jumlah meubeler yang diadakan	10	20.000.000	Pengadaan Meubeler	Malili	Jumlah meubeler yang diadakan	10 Unit	20.000.000	
III.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Malili	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	10.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Malili	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	10.000.000	
<b>III.6 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
III.6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Malili	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1.300 Surat	8.379.645	Penyediaan jasa surat menyurat	Malili	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1.300 Surat	8.379.645	
III.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Malili	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	24 rekening	50.704.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Malili	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	24 rekening	50.704.800	
III.6.1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Malili	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	5 Orang	75.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Malili	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	5 Orang	75.000.000	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

III.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
III.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Malili	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	48.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Malili	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	48.060.000	
III.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Malili	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	32.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Malili	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit	32.500.000	
III.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Malili	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Malili	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	





## 2. 5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 5**

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>TIDAK ADA USULAN</b>					





**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2020-2024 menggariskan visi **"INDONESIA YANG MANDIRI , MAJU, ADIL DAN MAKMUR"** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2022 berada pada tahap jangka menengah ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Dalam mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 6**

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional  
Dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Daerah Tahun 2022
1	Ketahanan Ekonomi Untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	
3	SDM berkualitas dan berdaya saing	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	
7	Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada **Prioritas ke – 7** yaitu **Stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik**.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Tahun Ke – 2 untuk periode 2021 – 2026, yaitu :

**Tabel 7**

Tujuan dan Sasaran Renstra  
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Kualitas pengawasan daerah	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Meningkatnya indeks Maturitas SPIP	Capaian Indeks Maturitas SPIP
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP

Apa sebenarnya arti Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau biasa disingkat Maturitas SPIP ?. Secara sederhana istilah ini menunjukkan ukuran kualitas dari Sistem Pengendalian Intern pada suatu organisasi di Pemerintahan. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Untuk mencapai kualitas pengendalian





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

intern yang baik, organisasi harus memenuhi parameter-parameter maturitas tertentu.

Kualitas Sistem Pengendalian Intern diukur melalui kemampuan Sistem Pengendalian Intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang dilihat melalui 2 (dua) hal, yaitu

- a. Aspek desain pengendalian intern (*control design*), aspek ini menyangkut ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi;
- b. Aspek penerapannya (*control implementation*), terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada.

Dengan demikian, organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktivitasnya, sehingga pengendaliannya telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Parameter pengukuran Maturitas Sistem Pengendalian Intern dapat diturunkan dari tiap-tiap unsur atau komponennya. Jika memakai kerangka kerja sistem pengendalian intern COSO 2013, ada 5 (lima) unsur yang perlu diturunkan parameternya yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian (*control environment*);
- b. Penilaian Resiko (*risk assessment*);
- c. Kegiatan Pengendalian (*Control activities*);
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*);
- e. Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*).

Di Tahun 2019, Penilaian Tingkat Maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP sebagai Koordinator Pembina SPIP, dilakukan penilaian Tingkat Maturitas SPIP di Luwu Timur kepada 10 (*sepuluh*) OPD, yaitu :

1. Inspektorat;
2. Baperlitbangda;
3. BKPSDM;
4. DPKAD;
5. PU-PR;





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

6. Dinas Catatan Sipil;
7. PM-PTSP;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan; dan
10. Sekretariat Daerah.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari belanja SKPD dan belanja urusan wajib/pilihan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukung. Indikator kinerja program dan kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya *misinterpretasi*, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek relevan, sehingga ditentukan indikator program/kegiatan seperti yang tertuang pada Tabel T-C.33 berikut :





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

**Tabel 8 (T-C.33)**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				<b>2.340.307.365</b>			<b>2.541.261.252</b>	
	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				<b>2.140.307.365</b>			<b>2.171.261.252</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan Kinerja	Malili	39 OPD	300.000.000	APBD		39 OPD 300.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas)	Malili	56 Obrik	1.100.000.000	APBD		56 Obrik 900.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	Malili	3 Kali	31.716.500	APBD	Lakip digabungkan dengan LPPD	3 Kali 35.000.000	
	Reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu Laporan keuangan yang dilaksanakan	Malili	6 Kali	67.926.575	APBD		6 Kali 70.000.000	
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Desa	124 desa	750.000.000	APBD		44 desa 500.000.000	
	Kerjasama pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	Malili	1 Persen	477.453.099	APBD		1 Persen 500.000.000	
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Malili	88,00	200.000.000	APBD		88,00 300.000.000	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

		internal dan eksternal							
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		95,00				95,00	
	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>				<b>200.000.000</b>				<b>370.000.000</b>
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Malili	50 Kali	400.000.000	APBD		25 Kali	350.000.000
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>529.416.992</b>				<b>747.358.691</b>
	<b>KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>529.416.992</b>	APBD			<b>747.358.691</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Malili	81 kali	150.000.000	APBD		42 kali	500.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Malili	39 OPD	11.650.000	APBD		39 OPD	15.000.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	9 Obrik	28.730.000	APBD		9 Obrik	200.000.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>8.515.953.849</b>				<b>8.342.448.478</b>
	<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>93.111.247</b>				<b>94.291.356</b>





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Malili	2 Dokumen	29.554.070	APBD		2 Dokumen	40.000.000
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	11.801.086	APBD		2 Dokumen	17.000.000
Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	5.373.620	APBD		2 Dokumen	8.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Malili	10 Dokumen	46.382.471	APBD		10 Dokumen	75.000.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>6.467.377.608</b>				<b>6.628.972.554</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Malili	45 Orang	6.063.797.850	APBD		45 Orang	7.756.557.408
Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Malili	17 Dokumen	5.797.685	APBD		18 Dokumen	5.000.000
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>671.532.249</b>				<b>653.251.823</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Malili	53 Pasang	47.500.000	APBD			60.000.000
Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Malili	12 Dokumen	6.821.694	APBD		12 Dokumen	7.000.000
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mks, Bdg, Batam	53 Orang	484.391.485	APBD		53 Orang	600.000.000





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	200 Orang	32.819.070	APBD		200 Orang	50.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Mks	10 Orang	100.000.000	APBD		10 Orang	100.000.000
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>				<b>579.348.300</b>				<b>579.348.300</b>
Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Malili	13 Unit	1.348.900	APBD		13 Buah	2.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malili	2 unit	21.806.500	APBD		2 unit	80.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Malili	16 Jenis	3.908.700	APBD		16 Jenis	5.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Malili	13.000 Lembar	10.000.000	APBD		13.000 Lembar	12.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Malili	60 Exemplar	6.180.000	APBD		60 Exemplar	7.500.000
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Malili	375 Orang	14.875.000	APBD		375 Orang	15.000.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Luar Daerah Dalam dan Luar Prov	73 Kali	521.229.200	APBD		73 Kali	600.000.000





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>480.000.000</b>			<b>162.000.000</b>
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Malili	1 Unit	500.000.000	APBD		100.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Malili	10 Unit	20.000.000	APBD		50.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD	3 Unit	30.000.000
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>134.084.445</b>			<b>134.084.445</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasi kan	Malili	1.300 Surat	8.379.645	APBD	1.300 Surat	10.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	Malili	24 rekening	50.704.800	APBD	24 rekening	65.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Malili	5 Orang	75.000.000	APBD	5 Orang	87.000.000
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>90.500.000</b>			<b>90.500.000</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Malili	8 Unit	48.060.000	APBD	8 Unit	58.060.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Malili	44 Unit	32.500.000	APBD	44 Unit	35.000.000





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>11.685.707.950</b>				<b>13.555.117.408</b>





**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 sebagai mana disajikan dalam tabel berikut :





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

**Tabel 9**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				<b>2.340.307.365</b>	
	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				<b>2.140.307.365</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan Kinerja	Malili	39 OPD	300.000.000	APBD
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik pengawasan keuangan (Opname kas)	Malili	56 Obrik	1.100.000.000	APBD
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	Malili	3 Kali	31.716.500	APBD
	Reviu Laporan keuangan	Jumlah reviu Laporan keuangan yang dilaksanakan	Malili	6 Kali	67.926.575	APBD
	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	Desa	124 desa	750.000.000	APBD
	Kerjasama pengawasan internal	Presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi	Malili	1 Persen	477.453.099	APBD
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal	Malili	88,00	200.000.000	APBD
		Presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		95,00		
	<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>				<b>200.000.000</b>	
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Malili	50 Kali	400.000.000	APBD
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>529.416.992</b>	
	<b>KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>529.416.992</b>	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Malili	81 kali	150.000.000	APBD





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Malili	39 OPD	11.650.000	APBD
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi	Malili	9 Obrik	28.730.000	APBD
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>8.515.953.849</b>	
<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>93.111.247</b>	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Malili	2 Dokumen	29.554.070	APBD
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	11.801.086	APBD
Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Malili	2 Dokumen	5.373.620	APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Malili	10 Dokumen	46.382.471	APBD
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>6.467.377.608</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	Malili	45 Orang	6.463.797.840	APBD
Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Malili	17 Dokumen	5.797.685	APBD
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>				<b>671.532.249</b>	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Malili	53 Pasang	47.500.000	APBD
Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutahirkan	Malili	12 Dokumen	6.821.694	APBD
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mks, Bdg, Batam	53 Orang	484.391.485	APBD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Malili	200 Orang	32.819.070	APBD
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Mks	10 Orang	100.000.000	APBD
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>				<b>579.348.300</b>	





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Malili	13 Unit	1.348.900	APBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Malili	2 unit	21.806.500	APBD
Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Malili	16 Jenis	3.908.700	APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Malili	13.000 Lembar	10.000.000	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Malili	60 Exemplar	6.180.000	APBD
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Malili	375 Orang	14.875.000	APBD
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Luar Daerah Dalam dan Luar Prov	73 Kali	521.229.200	APBD
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>480.000.000</b>	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Malili	1 Unit	500.000.000	APBD
Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Malili	10 Unit	20.000.000	APBD
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD
<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				<b>134.084.445</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasi kan	Malili	1.300 Surat	8.379.645	APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang terbayarkan	Malili	24 rekening	50.704.800	APBD
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	Malili	5 Orang	75.000.000	APBD
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>90.500.000</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Malili	8 Unit	48.060.000	APBD
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Malili	44 Unit	32.500.000	APBD
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	Malili	1 Unit	10.000.000	APBD





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

lainnya	yang dipelihara/direhabilitasi				
<b>JUMLAH</b>				<b>11.685.707.950</b>	





# RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja (RENCA) Inspektorat Tahun 2022 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Alokasi anggaran indikatif pada Tahun 2022 yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dikelompokkan dalam **Belanja Operasi** sebesar Rp. 10.883.871.706,-, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.463.797.840,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.420.073.866,-. Sementara **Belanja Modal** sebesar Rp. 501.806.500,- yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk Inspektorat Tahun 2022 sebesar Rp. 11.385.678.206,-

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk Inspektorat sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008, Surat Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/IJ tanggal 07 April 2017 dan surat Direktur Jendral Depdagri Nomor 700/503/A1/SJ tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu alokasi anggaran penanganan





## RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

covid-19 yang cukup besar memerlukan pengawasan agar terhindar dari penyelewengan.

Demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pengawasan.

INSPEKTUR

**SALAM LATIEF, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007

